

## OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIS DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA (Studi Kasus Desa Rantau Kumpai Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Jevika Sari<sup>1)</sup>, Aprilia Lestari<sup>2)</sup>, Eva Susanti<sup>3)</sup>

<sup>123)</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja  
Jl. Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Baturaja – 32115 OKU Sumatera Selatan  
e-mail: jevikasarii@gmail.com<sup>1)</sup> yarie@gmail.com<sup>2)</sup> evaftos@gmail.com<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*This study was motivated by the strategic role of the Village Secretary in ensuring effective and efficient village administrative governance. However, the main problems identified were delays in updating population data and the suboptimal utilization of information technology in village administrative services. This study employed a descriptive qualitative method with an institutional approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving five informants consisting of village officials and community members. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with Wibowo's performance theory serving as the analytical framework. The findings indicate that, in general, the performance of the Village Secretary of Rantau Kumpai has been optimal in terms of the indicators of goals, standards, feedback, and motivation. Meanwhile, the indicators of facilities, competence, and opportunity have not yet been fully optimized due to limited internet infrastructure, which has hindered the implementation of digital-based administrative services. Based on these findings, it is recommended that the village government prioritize improving internet network infrastructure to support more effective and efficient population administration services. Furthermore, the Ogan Komering Ulu Regency Government is expected to expand digital communication infrastructure development in remote villages, including Rantau Kumpai Village, to strengthen the implementation of technology-based public services.*

**Keywords:** Optimization, Performance, Village Secretary, Village Administration

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Sekretaris Desa dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang efektif dan akuntabel. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya keterlambatan penginputan data kependudukan, pengelolaan arsip yang belum optimal, serta keterbatasan akses internet yang menghambat administrasi berbasis digital di Desa Rantau Kumpai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara *purposive sampling*, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana dengan teori kinerja Wibowo sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator umpan balik, kompetensi, dan motif telah berjalan optimal. Indikator tujuan, standar, dan peluang berada pada kategori cukup optimal, sedangkan indikator sarana atau alat masih kurang optimal akibat keterbatasan jaringan internet yang menghambat pemanfaatan Sistem Informasi Desa, penginputan data, dan pelayanan administrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama optimalisasi kinerja Sekretaris Desa bukan terletak pada kapasitas individu, melainkan pada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur jaringan internet serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Kinerja, Sekretaris Desa, Administrasi Desa

### I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan sistem administrasi desa yang tertib karena administrasi menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan kebijakan, serta penyediaan data

pemerintahan yang akurat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Corneles et al., 2019).

Keberhasilan administrasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretaris Desa sebagai unsur yang bertanggung jawab mengoordinasikan administrasi pemerintahan, ketatausahaan, perencanaan, dan pelayanan administrasi desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Kinerja Sekretaris Desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta ketersediaan sarana pendukung administrasi (Ressi, 2014; Yasin, 2017).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya kapasitas aparatur desa sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan publik (Corneles et al., 2019; Yasin, 2017). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kompetensi aparatur atau pelaksanaan administrasi secara umum. Kajian yang menganalisis optimalisasi kinerja Sekretaris Desa secara komprehensif berdasarkan berbagai indikator kinerja serta keterkaitannya dengan kondisi infrastruktur pendukung administrasi desa masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil observasi awal menunjukkan masih terjadi keterlambatan pembaruan data kependudukan, khususnya data kelahiran, sehingga memengaruhi proses penerbitan dokumen administrasi masyarakat. Pengelolaan administrasi juga masih dilakukan secara manual karena keterbatasan akses internet di kantor desa, yang menyebabkan penginputan data pada Sistem Informasi Desa harus dilakukan di luar wilayah desa. Dampaknya, proses pelayanan administrasi menjadi kurang efisien, pengelolaan arsip belum tertata secara optimal, serta penyelesaian beberapa layanan administrasi membutuhkan waktu lebih lama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis optimalisasi kinerja Sekretaris Desa menggunakan indikator kinerja Wibowo yang meliputi tujuan, standar, umpan balik, sarana atau alat, kompetensi, motif, dan peluang. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi tingkat kinerja Sekretaris Desa, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kapasitas aparatur dengan dukungan infrastruktur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi kinerja Sekretaris Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kinerja**

Kinerja merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum, kinerja dipahami sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan standar yang telah ditetapkan organisasi, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas. Wibowo (2016) menjelaskan bahwa kinerja tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dicapai, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan pekerjaan yang didukung oleh kemampuan, kompetensi, motivasi, dan komitmen individu. Sejalan dengan itu, Mangkunegara (2017) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sedangkan Rivai dan Basri (2015) menekankan bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, Hasibuan (2016) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung proses pelaksanaan tugas. Persamaan pandangan para ahli menunjukkan bahwa pencapaian kinerja memerlukan kemampuan individu, motivasi, standar kerja, serta dukungan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

Penelitian ini menggunakan teori kinerja Wibowo (2016) karena memiliki indikator yang lebih komprehensif dibandingkan teori lainnya. Wibowo tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja melalui indikator tujuan, standar, umpan balik, sarana atau alat, kompetensi, motif, dan peluang. Ketujuh indikator tersebut dinilai relevan untuk menganalisis optimalisasi kinerja Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, karena mampu menggambarkan keterkaitan antara kemampuan aparatur, dukungan organisasi, serta kondisi lingkungan kerja yang memengaruhi pelaksanaan tugas administrasi desa.

Penelitian ini menggunakan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo (2016), yaitu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang, dan motif. Ketujuh indikator tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa. Melalui indikator tersebut, penelitian ini menganalisis sejauh mana kinerja Sekretaris Desa telah dioptimalkan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Rantau Kumpai.

Bagian ini juga masih didominasi definisi. Supaya sesuai dengan komentar reviewer, kita perlu menambahkan sintesis dan mengaitkan konsep optimalisasi dengan konteks penelitian. Saya tidak

menyarankan menambah teori baru karena jurnal biasanya membatasi panjang artikel. Cukup perbaiki alurnya.

### **B. Konsep Optimalisasi**

Optimalisasi merupakan upaya untuk mencapai hasil terbaik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Secara konseptual, optimalisasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga memperhatikan berbagai alternatif tindakan dan keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Siringoringo (2005) menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan proses memperoleh hasil terbaik dengan mempertimbangkan tujuan, alternatif keputusan, dan keterbatasan sumber daya. Winardi (2015) memandang optimalisasi sebagai upaya memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Mathis dan Jackson (2016) menegaskan bahwa optimalisasi merupakan tindakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi bukan sekadar meningkatkan hasil kerja, tetapi merupakan proses memaksimalkan seluruh potensi, sumber daya, dan sistem pendukung agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan optimalisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian ini memaknai optimalisasi sebagai upaya memaksimalkan kinerja Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat terlaksana secara tertib, akurat, efektif, dan tepat waktu.

Optimalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas (Hasibuan, 2016). Kedua, sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan fasilitas dan perlengkapan kerja yang mendukung efektivitas pelaksanaan administrasi (Moenir, 2015). Ketiga, kebijakan berupa regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas aparatur desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Keempat, motivasi kerja, yaitu dorongan yang memengaruhi kesungguhan aparatur dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung optimalisasi kinerja Sekretaris Desa. Penelitian ini tidak menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai indikator analisis, melainkan memfokuskan pengukuran optimalisasi melalui indikator kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo (2016). Konsep optimalisasi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa pencapaian kinerja Sekretaris Desa dipengaruhi oleh

kemampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam menghadapi berbagai keterbatasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

### **C. Administrasi Pemerintahan Desa**

Administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data serta informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pencatatan berbagai data pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi Badan Permasyarakatan Desa, dan administrasi lainnya (Permendagri Nomor 47 Tahun 2016). Pengelolaan administrasi yang tertib menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Nurcholis (2017) menyatakan bahwa administrasi desa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik karena menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan. Wasistiono dan Tahir (2015) menjelaskan bahwa administrasi desa tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga sebagai sistem informasi pemerintahan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas aparatur desa.

Berdasarkan pendapat tersebut, administrasi pemerintahan desa tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pencatatan dokumen, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kualitas administrasi desa ditentukan oleh ketertiban pengelolaan data, ketepatan informasi, serta kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan administrasi desa dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya penerapan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa (Saparin, 2014). Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Moenir (2015) menyatakan bahwa pelayanan administrasi publik harus mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hardiyansyah (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh aspek keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan ketersediaan sarana pendukung.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan sarana yang tersedia. Penelitian ini memandang administrasi pemerintahan desa sebagai objek utama yang

dipengaruhi oleh optimalisasi kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan dokumen pemerintahan desa.

#### D. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan unsur pimpinan sekretariat desa yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, dan perencanaan desa (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015). Kedudukan tersebut menjadikan Sekretaris Desa sebagai koordinator utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa sehingga keberhasilan penyelenggaraan administrasi sangat dipengaruhi oleh kinerjanya.

Widjaja (2014) menyatakan bahwa Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Solekhan (2014) menjelaskan bahwa Sekretaris Desa berfungsi mengoordinasikan administrasi surat-menyurat, pengelolaan arsip, administrasi perangkat desa, penyusunan perencanaan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nurcholis (2017) menegaskan bahwa Sekretaris Desa juga berperan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Sekretaris Desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai koordinator yang memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan desa berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Peran tersebut menempatkan Sekretaris Desa sebagai salah satu aktor utama yang menentukan kualitas pelayanan administrasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan tugas tersebut menuntut Sekretaris Desa memiliki kompetensi yang memadai, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Kompetensi tersebut mencakup pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa, kemampuan mengelola administrasi dan arsip, penguasaan teknologi informasi, penyusunan laporan, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi (Riana, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Konteks penelitian ini memosisikan Sekretaris Desa sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana, kesempatan pengembangan kapasitas, serta kondisi

organisasi yang memungkinkan tugas administrasi dilaksanakan secara optimal.

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) untuk menganalisis optimalisasi kinerja Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan Umum, dan masyarakat, karena dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui proses transkripsi, *coding*, dan pengorganisasian data. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kaur Umum, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan informasi yang dimaksud oleh informan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles et al., 2024; Moleong, 2017).

### IV. PEMBAHASAN

#### 1. Tujuan

Indikator tujuan menunjukkan bahwa Sekretaris Desa di Desa Rantau Kumpai telah memiliki pemahaman yang jelas mengenai arah pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Kaur Umum menunjukkan adanya kesamaan persepsi bahwa administrasi desa harus dilaksanakan secara tertib, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga mengharapkan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit, sehingga tujuan pengelolaan administrasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan kerja telah dipahami dan menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas administrasi. Meskipun demikian, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal

karena masih ditemukan keterlambatan penginputan data, pengelolaan arsip yang belum tertata, serta keterbatasan pemanfaatan Sistem Informasi Desa akibat kendala jaringan internet. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kejelasan tujuan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan organisasi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa tujuan memberikan arah bagi individu dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi pencapaiannya tetap dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Dengan demikian, indikator tujuan dalam optimalisasi kinerja Sekretaris Desa dapat dikategorikan cukup optimal karena telah memiliki arah kerja yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dalam pelaksanaan administrasi desa.

## **2. Standar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator standar dalam pengelolaan administrasi desa telah diterapkan cukup baik oleh Sekretaris Desa Rantau Kumpai. Kepala Desa menegaskan bahwa seluruh perangkat desa bekerja berdasarkan ketentuan administrasi yang tertib, rapi, dan akuntabel. Standar tersebut diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas, pengelolaan arsip, serta koordinasi antarperangkat desa. Ketua BPD juga menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi telah mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama dalam aspek ketertiban administrasi, ketepatan pelaporan, dan keakuratan data.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan masih terdapat keterlambatan pembaruan data kependudukan, khususnya data kelahiran, yang berdampak pada proses penerbitan dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa standar kerja telah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur.

Indikator standar dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup optimal. Standar kerja yang jelas telah menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Pencapaian standar tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemukan keterlambatan pada beberapa pelayanan administrasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa standar merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

## **3. Umpan Balik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator umpan balik dalam pengelolaan administrasi desa telah berjalan dengan baik. Kepala Desa menyampaikan bahwa evaluasi, arahan, dan saran perbaikan dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi yang melibatkan BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Sekretaris Desa juga memanfaatkan setiap masukan sebagai bahan

evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan administrasi desa.

BPD turut memberikan masukan dalam pembaruan administrasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Perangkat desa menilai bahwa arahan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa membantu meningkatkan ketertiban penyusunan surat serta pengelolaan arsip. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, meskipun masih mengharapkan tindak lanjut yang lebih cepat terhadap beberapa pelayanan administrasi.

Indikator umpan balik dalam penelitian ini dapat dikategorikan optimal. Proses evaluasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja. Kecepatan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pelayanan administrasi menjadi lebih responsif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa umpan balik berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

## **4. Sarana atau Alat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sarana atau alat dalam pengelolaan administrasi desa didukung oleh ketersediaan fasilitas dasar, seperti laptop, printer, dan lemari arsip. Kepala Desa menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Desa serta diawasi agar digunakan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada belum tersedianya jaringan internet yang memadai. Kondisi tersebut menghambat penginputan data, pelaporan berbasis daring, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat karena Sekretaris Desa harus keluar desa untuk memperoleh akses internet.

Indikator sarana atau alat dalam penelitian ini dapat dikategorikan kurang optimal. Ketersediaan sarana fisik telah mendukung pekerjaan administrasi, tetapi belum didukung oleh infrastruktur internet yang memadai sehingga pemanfaatan fasilitas yang ada belum berjalan secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi.

## **5. Kompetensi**

Kompetensi merupakan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas secara profesional. Kompetensi Sekretaris Desa menjadi faktor penting dalam pengelolaan administrasi desa karena berkaitan dengan kemampuan memahami regulasi, mengelola

administrasi, mengoperasikan teknologi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretaris Desa telah memiliki kompetensi yang baik. Kepala Desa menyatakan bahwa Sekretaris Desa mampu mengelola administrasi, mengoperasikan komputer, menyusun laporan, serta menjalin koordinasi yang baik dengan perangkat desa. Sekretaris Desa juga mengakui bahwa pelaksanaan administrasi, pembuatan surat, dan pengoperasian komputer dapat dilakukan tanpa kendala. Ketua BPD, Kaur Umum, dan masyarakat turut menilai bahwa Sekretaris Desa memiliki pengetahuan, tanggung jawab, dan sikap kerja yang baik dalam memberikan pelayanan administrasi.

Indikator kompetensi dalam penelitian ini dapat dikategorikan optimal. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Sekretaris Desa telah mendukung pelaksanaan administrasi desa secara baik. Keterlambatan penyelesaian administrasi yang masih terjadi lebih dipengaruhi oleh keterbatasan akses internet daripada kemampuan individu. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif.

## **6. Motif**

Motif merupakan dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motif menjadi faktor penting dalam pengelolaan administrasi desa karena memengaruhi semangat dan komitmen Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja Sekretaris Desa didorong oleh rasa tanggung jawab, komitmen terhadap pembangunan desa, dan keinginan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekretaris Desa juga menyatakan bahwa motivasi utamanya adalah mewujudkan administrasi desa yang tertib dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketua BPD menilai motivasi tersebut diperkuat oleh dukungan Kepala Desa dan apresiasi kelembagaan, sedangkan Kaur Umum serta masyarakat melihat semangat kerja Sekretaris Desa tetap terjaga dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Indikator motif dalam penelitian ini dapat dikategorikan optimal. Motivasi kerja Sekretaris Desa didukung oleh dorongan dari dalam diri maupun lingkungan kerja sehingga mampu menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas administrasi. Kendala teknis yang dihadapi belum memengaruhi komitmen Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa motif merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja individu dalam organisasi.

## **7. Peluang**

Peluang merupakan kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Peluang dalam penelitian ini diwujudkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop yang mendukung peningkatan kompetensi Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretaris Desa secara rutin memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan sistem administrasi desa. Ketua BPD menilai peluang pengembangan telah tersedia, meskipun pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Kaur Umum juga menyatakan bahwa hasil pelatihan dibagikan kepada perangkat desa lainnya, sedangkan masyarakat merasakan adanya peningkatan kemampuan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan administrasi.

Indikator peluang dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup optimal. Kesempatan pengembangan kapasitas telah diberikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Sekretaris Desa sehingga mendukung peningkatan kompetensi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa masih belum maksimal sehingga peluang pengembangan belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap optimalisasi kinerja. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa peluang merupakan kesempatan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kinerjanya.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kinerja Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi di Desa Rantau Kumpai telah berjalan dengan baik dari aspek kapasitas individu, yang ditunjukkan melalui kompetensi, komitmen, dan motivasi kerja aparatur. Namun, optimalisasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur, terutama keterbatasan jaringan internet yang menghambat penginputan data, pengelolaan arsip digital, dan pelayanan administrasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas administrasi desa tidak hanya bergantung pada kemampuan aparatur, tetapi juga pada tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

## **SARAN**

- a. Pemerintah Desa Rantau Kumpai diharapkan meningkatkan dukungan terhadap penyediaan jaringan internet yang memadai guna mengoptimalkan pengelolaan administrasi desa berbasis digital.
- b. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan memperluas pembangunan infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan untuk mendukung peningkatan

kualitas pelayanan administrasi desa berbasis teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A.S. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2017. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2015. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

### Jurnal

- Adivievianti Ressi. 2014. "Analisa Kinerja Aparatur Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo."
- Cassandra Corneles, Femmy Tulusan, dan Verry Londa. 2019. "Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)."
- Riana, Agus Wahyudi. 2017. "Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* No. 2: 113-122.
- Syahrudin Yasin. 2017. "Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat."

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.